

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeliharaan bangunan gedung KPKNL Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan konsep manajemen properti secara umum dan peraturan per undang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi secara langsung selama empat puluh hari kerja. Dari Hasil penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan properti bangunan gedung KPKNL Kota Bukittinggi sudah cukup sesuai dengan prosedur pemeliharaan properti yang dijelaskan dalam teori manajemen properti dan sudah cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun demikian, dalam penerapan manajemen pemeliharaan properti, secara umum masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan properti bangunan gedung KPKNL Kota Bukittinggi. Kendala yang dimaksud timbul dikarenakan adanya kebijakan yang masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan dan kondisi geografis Kota Bukittinggi yang menyebabkan terjadi beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan manajemen properti pada bangunan gedung KPKNL Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi kendala atas pelaksanaan pemelihataan properti bangunan gedung KPKNL Kota Bukittinggi, dibutuhkan kebijakan baru.

Abstract

This study aims to determine whether the maintenance of the Bukittinggi City KPKNL building is in accordance with the general property management concept and the laws and regulations that govern it. This research is a qualitative research method with data obtained through direct observation for forty working days. From

the results of this study, it can be shown that the implementation of property maintenance for the KPKNL building in the City of Bukittinggi is sufficient in accordance with the property maintenance procedures described in property management theory and is sufficient in accordance with the laws and regulations that govern it. However, in the implementation of property maintenance management, in general there are still several obstacles in the implementation of property maintenance for the Bukittinggi City KPKNL building. The constraints in question arise due to policies that are still not in accordance with the conditions in the field and the geographical conditions of the City of Bukittinggi, which causes several limitations in the implementation of property management in the KPKNL building in the City of Bukittinggi. To overcome the obstacles to the implementation of the property inspection of the Bukittinggi City KPKNL building, a new policy is needed.